



Kementerian Agama

LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

Kode>Nama Satker	: 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
Nama Unit Kerja	: Sekretariat Jenderal
Nama Kegiatan	: Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian TLHP
Tahun Pelaksanaan	: 2021
Tujuan Kegiatan	: Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas secara akuntabel
Jenis Kegiatan	: Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas (Perjadin)

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
1	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Penetapan kegiatan tidak mengacu pada sasaran strategis dan IKU unit kerja	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja SKALA KEMUNGKINAN: Tinggi SKALA DAMPAK: Tinggi STATUS RISIKO: Tinggi	Peraturan perjalan Dinas KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Verifikasi dan validasi TOR	Nota Dinas Kasubbag Ortala dan KUB	Pengelola TLHP	Tim Monitorng dan Evaluasi	Verifikasi dan validasi TOR			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	PEMANTAUAN			USULAN PERBAIKAN
								RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	
2	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Perencanaan penyusunan program kerja tahunan kurang matang	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Tinggi STATUS RISIKO: Rendah	SOP dan Schedule Time KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Validasi dan verifikasi	Nota Dinas Kasubbag Ortala dan KUB	Pengelola TLHP	Satker memiliki Saldo TLHP	Validasi dan verifikasi			
3	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang tidak memahami substansi kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Nota Dinas Pimpinan KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	verifikasi dan validasi	Nota Dinas Kasubbag Ortala	Kasubbag Ortala	Kepala	verifikasi dan validasi			
4	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang tidak memahami substansi kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Nota Dinas Pimpinan KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	verifikasi dan validasi	Nota Dinas Kasubbag Ortala	Kasubbag Ortala	Kepala	verifikasi dan validasi			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
5	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang tidak memahami substansi kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Nota Dinas Pimpinan KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	verifikasi dan validasi	Nota Dinas Kasubbag Ortala	Kasubbag Ortala	Kepala	verifikasi dan validasi			
6	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang tidak memahami substansi kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Nota Dinas Pimpinan KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	verifikasi dan validasi	Nota Dinas Kasubbag Ortala	Kasubbag Ortala	Kepala	verifikasi dan validasi			
7	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan revidu dengan teliti dalam penyusunan TOR kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	SK Kegiatan KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Verifikasi dan validasi	Nota Dinas Kasubbag	Petugas TLHP	PPK	Verifikasi dan validasi			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
8	<p>Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM</p> <p>PENYEBAB: Penyusun RAB tidak memahami standar biaya yang berlaku</p>	<p>Rencana biaya tidak dapat dibayarkan</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Tinggi</p> <p>STATUS RISIKO: Tinggi</p>	<p>PMK Nomor 19 Tahun 2021 tentang SBM</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	DIPA dan SMB	Rincian RAB Kegiatan	Tim Kerja TLHP	Bendahara	DIPA dan SMB			
9	<p>Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM</p> <p>PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan revidi dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan</p>	<p>Rencana biaya tidak dapat dibayarkan</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>PMK Nomor 19 Tahun 2020 tentang SBM</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	Verifikasi dan Validasi	RAB Kegiatan	Kasubbag	PPK	Verifikasi dan Validasi			
10	<p>Surat Tugas dan SPD dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan</p> <p>PENYEBAB: Perencanaan kegiatan tidak matang</p>	<p>Proses administrasi kegiatan terhambat</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Surat Tugas</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	validasi dan nomor surat	SK dan Surat Tugas	Kasubbag Ortala dan KUB	Satker TLHP	validasi dan nomor surat			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN				
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN	
11	Surat Tugas dan SPD dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam setiap perencanaan kegiatan	Segala Pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	PMK Nomor 19 Tahun 2020 tentang SBM 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Validasi dan verifikasi	Surat Tugas dan SPD	PPK	Tim TLHP	Validasi dan verifikasi				
12	Surat Tugas dan SPD dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam setiap perencanaan kegiatan	Segala Pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	PMK nomor 19 Tahun 2020 tentang SBM 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Validasi dan verifikasi	Surat Tugas dan SPD	PPK	Tim TLHP	Validasi dan verifikasi				
13	Penetapan petugas monitoring tidak sesuai dengan RAB (melebihi RAB) PENYEBAB: Penyusun Surat Tugas tidak memperhatikan TOR dan RAB kegiatan (TOR tidak dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan)	Pembayaran melebihi RAB SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	DIPA / RKKL KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	RAB dan Surat Tugas	SK, TOR dan RAB	PPK	Tim TLHP	RAB dan Surat Tugas				

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	INFORMASI DAN KOMUNIKASI					PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
14	<p>Penetapan petugas monitoring tidak sesuai dengan RAB (melebihi RAB)</p> <p>PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan revidu dengan teliti dalam penyusunan Surat Tugas</p>	<p>Pembayaran melebihi RAB</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>DIPA dan POK</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Verifikasi dan validasi</p>	<p>Surat Tugas dan SK</p>	<p>Tim TLHP</p>	<p>PPK</p>	<p>Verifikasi dan validasi</p>			
15	<p>Surat Tugas ditandatangani oleh pejabat yang tidak sesuai dengan kewenangannya</p> <p>PENYEBAB: Penyusun Surat Tugas tidak memahami kewenangan pejabat terkait penandatanganan Surat Tugas</p>	<p>Segala pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Surat Tugas dan SPD</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>DIPA dan POK</p>	<p>Surat Tugas</p>	<p>Ka Subbag Ortala dan KUB</p>	<p>Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas</p>	<p>DIPA dan POK</p>			
16	<p>Surat Tugas ditandatangani oleh pejabat yang tidak sesuai dengan kewenangannya</p> <p>PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan revidu dengan teliti dalam penyusunan SK kegiatan</p>	<p>Segala pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>	<p>Nota Dinas Kasubbag Ortala dan KUB</p>	<p>Pengelola Kegiatan</p>	<p>Tim Monev</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
17	<p>Perjadi tidak tepat sasaran dan Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan bukan oleh pegawai yang kompeten (tidak seuai tugas fungsinya)</p> <p>PENYEBAB: PPK dan penanggung jawab kegiatan tidak cermat dalam menyusun perencanaan</p>	<p>Berpotensi merugikan negara/pemborosan</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Anjab dan Tusi Pegawai</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Validasi dan verifikasi, Matrik temuan TLHP</p>	SK/Surat Tugas	Ka subbag Ortala dan KUB	PPK dan Bendahara	Validasi dan verifikasi, Matrik temuan TLHP			
18	<p>Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas (misal: pembayaran uang harian/hotel/transport melebihi SBM, Kelebihan pembayaran biaya hotel (tugas 3 hari, hotel juga 3 hari), Terdapat pembayaran ganda, Pembayaran transport lokal tidak sesuai ketentuan)</p> <p>PENYEBAB: PPK dan Penanggung jawab kegiatan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pencairan anggaran perjalanan dinas.</p>	<p>Berpotensi merugikan negara</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>validasi dan verifikasi</p>	SK/Surat Tugas, SPD	PPK	Bendahara	validasi dan verifikasi			

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN				
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN	
19	Perjalanan dinas fiktif PENYEBAB: PPK dan Penanggung jawab kegiatan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pencairan anggaran perjalanan dinas.	Berpotensi merugikan negara SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Dokumentasi Kegiatan	SK/Surat Tugas	Kasubbag Ortala dan KUB	Tim TLHP	Dokumentasi Kegiatan				
20	Laporan perjadiin terlambat/tidak dibuat PENYEBAB: Tidak ada kebijakan tertulis yang mewajibkan pembuatan laporan dengan batasan waktu tertentu bagi pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas.	- Pelaksanaan tugas melalui perjalanan dinas sulit dievaluasi diukur tingkat keberhasilan/kegagalan - Saran yang diberikan oleh tim perjalanan dinas berpotensi tudak up to date; - Tindak lanjut atas hasil kegiatan perjalanan dinas berpotensi tidak berpengaruh besar terhadap pelaksanaan program yg sama di tahun berikutnya. SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Laporan kegiatan	Laporan Kegiatan	Tim TLHP	Kepala Kantor	Laporan kegiatan				

Bangkaew, 25 Desember 2021

Satgas SPIP
Ketua,

(Dr. H. Handani, M. Pol)

NIP 196811071997031005